

PBTY Cermin Yogyakarta Tamansari Indonesia



Pembukaan PBTY XVIII 2023 dengan pemukulan tambur oleh Sultan didampingi Ketua Panitia, tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa.

YOGYA (KR) - Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) bisa menjadi cerminan keberagaman di Yogyakarta. Semakin terasa bermakna karena suasana kehidupan Yogyakarta yang menunjukkan kayanya keragaman suku-suku bangsa yang hidup di Yogyakarta sebagai Tamansari-nya Indonesia. Masyarakat yang beragam bisa saling bersanding dan mengisi satu sama lain.

Tak sekedar berdiri sebagai budaya yang terpisah namun menjadi bagian kesatuan, ungkap Gubernur DIY, Sri Sultan HB X saat membuka PBTY XVIII 2023, Senin (30/1) malam di Kampung Ketandan, Kota Yogyakarta. Membawa tema 'Bangkit Jogjakarta untuk Indonesia', PBTY 2023 berlangsung sepekan hingga Minggu (5/2). "Event PBTY sangat penting, bukan acara biasa

namun juga akulturasi budaya. Tepatnya antara budaya Tionghoa dengan Nusantara khususnya Yogyakarta," ungkap Sultan yang mengakhiri sambutan dengan mengucapkan selamat, semoga banyak rezeki, Gong Xi Fa Cai. Pembukaan dimeraikan penampilan seni budaya Tionghoa dari berbagai Paguyuban Tionghoa (Hakka, Fu Qing Hoo Hap.Hwee) Sanggar Natyalaksita, dan penampilan menarik lainnya. Selain itu juga disemarakkan keikutsertaan 160 lebih stan bazaar kuliner dengan pemukulan Imlek. "Setiap hari akan ditampilkan atraksi dari perkumpulan Liong Samsi/Naga Barongsai. "Juga ada Wayang Po Tay Hee sebagai pertunjukan wayang khas Tionghoa setelah seluruh rangkaian acara pentas seni berakhir," ucap Ketua Panitia PBTY 2023 Sugiarto.

Selanjutnya, Karnaval digelar Sabtu, (4/2) dengan Kirab Budaya yang akan menampilkan kolaborasi seni budaya Tionghoa dan budaya lokal lainnya. "Karnaval dimulai dari Taman Parkir Abu Bakar Ali - jalan Malioboro n jalan Ahmad Yani - Kawasan Titik Nol Kilometer. Juga ditampilkan Jogja Dragon Festival, yaitu perlombaan performance naga yang memperebutkan piala Gubernur dan uang pembinaan," jelasnya. Lomba karaoke, lomba bahasa & budaya Tionghoa digelar untuk pelajar dan umum. "Panggung hiburan, Pentas seni selama 7 hari acara, menampilkan budaya Tionghoa dan budaya lokal lainnya. Sedang seremoni penutupan di Panggung Utama Ketandan. Sukses PBTY menjadi momentum kebangkitan pariwisata," ungkapnya. (Vim)-f

SEBULAN GERAKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK

Tren Penurunan Volume Sampah Terus Terjadi

YOGYA (KR) - Tren penurunan volume sampah yang harus disetorkan ke TPA Piyungan dari Kota Yogyakarta terus terjadi. Terutama setelah digencarkannya gerakan zero sampah anorganik yang telah berjalan hampir sebulan. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Ir Aman Yuridijaya MM, hingga pekan ketiga di Januari rata-rata sampah yang dibuang ke TPA Piyungan berkurang hingga 20 ton per hari. "Terjadi tren penurunan untuk skala harian. Ini yang akan terus kita upayakan," tandasnya, Selasa (31/1). Pada tahun lalu rata-rata volume sampah yang disetorkan oleh Kota Yogyakarta ke TPA Piyungan mencapai sekitar 250 ton hingga 260 ton per hari. Meskipun volume sampah itu kini semakin berkurang, namun jumlah tersebut akan terus ditingkatkan hingga sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam waktu tiga bulan atau sampai akhir Maret 2023. Target yang diupayakan Pemkot ialah bisa berkurang sebanyak 40 ton hingga 50 ton per hari. Penetapan target itu merupakan volume sampah anorganik yang tidak lagi dapat dibuang ke depo atau tempat pembuangan sampah (TPS) dan dinilai masih memiliki nilai keekonomian sehingga masih

memungkinkan untuk dijual melalui pelapak. Aman menambahkan, melalui gerakan bebas sampah anorganik yang berlaku mulai awal Januari, warga Kota Yogyakarta diminta untuk mengelola dan memilah sampah sejak dari sumbernya. Sampah yang diizinkan dibuang ke depo atau TPS hanya sampah organik dan residu. Sedangkan sampah anorganik dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan disalurkan melalui bank sampah yang kemudian akan menjualnya ke pengepul atau pelapak. "Kami akan mengevaluasi secara keseluruhan pelaksanaan gerakan ini dalam waktu tiga bulan atau hingga akhir Maret," ungkapnya. Dirinya yang juga Ketua Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta berharap gerakan tersebut akan mampu mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan. Sehingga harapannya dalam waktu tiga bulan seluruh masyarakat memiliki kesadaran untuk mengelola sampah yang diproduksinya. Setelah tiga bulan, gerakan bebas sampah anorganik akan diikuti dengan penindakan terhadap warga yang belum mengelola sampah dengan memilahnya. (Dhi)-f

KOMISI D JAMIN HAK PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Tak Masuk KMS, Warga Mengadu ke Dewan

YOGYA (KR) - Sekitar 100 warga Kota Yogyakarta mengadu ke lembaga dewan lantaran tidak masuk sebagai penerima Kartu Menuju Sehat (KMS). Mereka juga mempertanyakan program tersebut karena mendapat informasi KMS tidak lagi digulirkan dan digantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kehadiran warga itu turut didampingi ketua kampung maupun RW setempat. "Informasinya kan tahun ini tidak ada lagi KMS. Semua mengacu pada DTKS. Tetapi kemarin ada pembagian KMS. Kami juga harus menengahi warga kami yang tidak mendapatkan KMS," terang Ketua RW 09 Wirogunan Mergangsang Yogi Prasetyo, di gedung DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (31/1). Yogi tidak menampik, sebagian warga mengharapkan KMS untuk bisa mendapatkan kuota ke sekolah negeri. Apalagi lokasi sekolah negeri khususnya jenjang SMP tidak merata sehingga perebutan kursi melalui jalur zonasi semakin tidakimbang. Oleh karena itu dirinya mengharapkan advokasi dari anggota dewan sekaligus memperoleh

gambaran utuh terkait KMS. Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Suryani, mengungkapkan pihaknya akan menjamin hak warga terkait pendidikan maupun kesehatan. Warga yang tidak masuk sebagai penerima KMS pun jangan khawatir karena sudah ada kebijakan dari pemerintah. "KMS jangan dijadikan tujuan untuk sekolah negeri. Kalau pun harus sekolah di swasta, kami bersama eksekutif sudah menyiapkan skema bantuan yang bisa diakses," ujarnya. Skema tersebut antara lain bantuan tunggakan SPP yang tahun lalu dianggarkan Rp 1 miliar. Kemudian bantuan ijin tertinggal dengan alokasi maksimal Rp 3 juta tiap siswa bagi jenjang SD serta maksimal

Rp 6 juta tiap siswa di jenjang SMA. Selain itu juga ada bantuan operasional sekolah daerah (bosda) swasta dengan besaran antara Rp 2,25 juta hingga Rp 4,5 juta per siswa per tahun sesuai jenjang sekolah. "Semua bantuan itu bisa diakses. Terutama tunggakan SPP dan ijin tertinggal, silakan diajukan supaya nanti bisa diverifikasi. Kalau bosda swasta langsung masuk ke rekening sekolah," paparnya. Dengan demikian, penduduk Kota Yogyakarta seharusnya tidak khawatir menyangkut akses pendidikan. Apalagi kesehatan yang capaiannya sudah mencapai 99,9 persen. Komisi D menaruh perhatian serius untuk dua bidang tersebut guna pembangunan sumber daya

manusia. Suryani juga tidak menampik sekolah negeri di Yogyakarta sisi selatannya sedikit. Namun pihaknya bersama dinas terkait sudah menambah jumlah kelas agar daya tampungnya semakin banyak. Langkah tersebut dinilai lebih efektif jika dibanding mendirikan sekolah baru. Selain itu, kuota KMS untuk kursi di SMP negeri sebetulnya juga tidak banyak, yakni 11 persen. Kuota itu pun sudah mempertimbangkan rasa keadilan bagi elemen masyarakat lain yang non KMS. "Lebih baik mari kita ajari anak-anak kita untuk belajar agar bisa bersaing ke jalur prestasi atau jalur mutu. Kuotanya justru lebih besar di sana. Kalau pun belum mampu bersaing, kan tidak masalah di swasta. Toh skema bantuan juga besar," tandasnya. Terkait data pemegang KMS maupun DTKS yang dinilai warga tidak tepat, Suryani mengajak untuk melapor



Sejumlah warga mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta terkait persoalan KMS 2023.

kan ke instansi terkait disertai bukti. Hal ini supaya intervensi dari pemerintah benar-benar tepat sasaran. Sementara Substansi Data dan Informasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Agus Budi, menjelaskan pihaknya tidak menghapus KMS. Akan tetapi pendataan KMS memang sudah tidak dilakukan karena semua

program bantuan sosial harus didasarkan pada satu data yakni DTKS, sesuai arahan dari KPK. "Justru kami selalu mendorong ke wilayah agar warga kurang mampu yang belum masuk DTKS segera diusulkan melalui wilayahnya. Selanjutnya DTKS itu akan kami verifikasi dan hasilnya kami wujudkan dalam KMS," jelasnya. Pada tahun ini, semua pe-

melegang KMS merupakan bagian dari DTKS. Berbeda dengan tahun lalu, masih ada 12 KK atau 812 jiwa pelegang KMS namun tidak masuk DTKS. Jumlah DTKS Kota Yogyakarta yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial mencapai 55.019 KK atau 146.789 jiwa. Sedangkan hasil verifikasi, terdapat 17.451 KK atau 49.121 jiwa masuk KMS tahun 2023. (Dhi)-f

MAYORA GROUP CAREER EXHIBITION Pasar Kerja Diwarnai Ketidaksiharian



Elly Supriyanti MEd didampingi para pejabat membuka Mayora Group Career Exhibition.

YOGYA (KR) - Pasar kerja masih diwarnai ketidaksiharian, antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan industri. Baik dari segi pendidikan, pengetahuan maupun ketrampilan. Akibatnya, kinerja kelembagaan pasar kerja Indonesia menjadi kurang baik sehingga menjadi salah satu hambatan bagi proses penanaman investasi. Pada gilirannya, keadaan tersebut mengakibatkan munculnya pengangguran, berkurangnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya daya saing dan berkurangnya kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian ditegaskan Paku Alam X, Wakil Gubernur DIY dalam sambutan tertulis yang dibacakan Elly Supriyanti KS SPsi MEd (Kabid P2 TK PKK Trans) saat pembukaan Mayora Group Career Exhibition di SMA Santo Thomas, Jalan Timoho, Balirejo Utara, Mujuju, Kota Yogyakarta, Selasa (31/1). Mayora Group Career Exhibition masih berlangsung hingga hari ini, Rabu (1/2). Sebelumnya dari Mayora, Menthol Hartoyo (HRD Manager sekaligus Supporting Event), Selly (Corporate OD, Comben & Recruitment Dept Head) menyampaikan apresiasi atas tingginya respons pencari kerja Mayora Group Career Exhibition di Kota Yogyakarta. Pembukaan acara berlangsung meriah dengan disemarakkan Tari Sigrak (Vivi Thowok), Tari Angguk. Menurut Wagub DIY, realitas dunia kerja di DIY seperti itu. "Maka tepat kiranya, PT Mayora Indah membuka bursa kerja DIY yang dikenal sebagai kota pelajar. DIY memiliki potensi SDM yang besar. Career Exhibition ini memiliki peran penting dalam mengurai permasalahan dan tantangan, terkait dengan link and match di dunia kerja," ujarnya. (Jay)-f

KEPALA PERWAKILAN KANTOR JICA BERTEMU SULTAN

Aerotropolis YIA Harus Terkoneksi dengan Sekitarnya

YOGYA (KR) - Kawasan Yogyakarta International Airport (YIA) harus memiliki interkoneksi dengan pengembangan kawasan aerocity dan daerah sekitarnya. Dengan demikian, pengembangan antar kawasan tersebut dapat saling mendukung proses pembangunan baik, infrastruktur, bisnis, SDM, maupun kultural daerah masing-masing. "Ngersa Dalem sempat berpesan, jangan sampai nanti pengembangan yang di dalam aerocity yang sudah dikelola oleh PT Angkasa Pura I, tidak nyambung dengan yang di aerotropolis. Apalagi sampai tidak nyambung dengan yang ada di kawasan Kulonprogo. Jadi nanti bisa saling dukung infrastruktur. Misalnya infrastruktur pendidikan, apa perlu di dalam kompleks airport kalau di luar sudah ada, seperti itu misalnya. Nanti bisa dibiarkan lagi," kata Penjabat Bupati Kulonprogo, Tri Saktiyana usai mendampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Kepala Perwakilan Kantor Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia, Yasui Takehiro bersama rombongan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Selasa (31/1). Diungkapkan, kunjungan Kepala Perwakilan Kantor JICA Indonesia

bersama rombongannya untuk melaporkan perkembangan terkait tahap survei awal yang tengah dilakukan oleh pihak Kantor Perwakilan JICA Indonesia. Terutama dalam pengembangan kawasan aerotropolis di kawasan YIA yang direncanakan. Tahap survei tersebut sebagai tindak lanjut dari MoU Layanan Konsultasi Teknis Pembangunan Aerotropolis di kawasan Yogyakarta International Airport yang telah ditandatangani dengan Pemda DIY pada Oktober 2022 lalu. "Pengembangan kawasan aerocity di YIA berada di dalam lingkup PT Angkasa Pura I dengan luas lahan sebesar 600 hektare. Adapun dari jumlah luas lahan wewenang PT Angkasa Pura I tersebut, terdapat tanah seluas 60 hektare yang masih tersisa dan bisa dikembangkan. Oleh karena itu, pengembangan antar kawasan di YIA harus memiliki interkoneksi. Mengetahui bahwa pengembangan aerocity akan terhubung dengan pengembangan aerotropolis yang lebih luas sehingga harus saling mendukung," jelasnya. Menurutnya, aerotropolis tersebut terhubung, tersambung, terdukung dengan kawasan Kulonprogo yang lebih luas. Karena kawasan Kulonprogo akan terdukung dan terkoneksi dengan kawasan DIY yang lebih luas termasuk juga kawasan

Jawa Tengah khususnya Purworejo maupun nanti Magelang. Jadi harus terjadi interkoneksi yang saling dukung. "Saling mendukung disini baik saling dukung infrastruktur fisiknya, proses bisnisnya maupun SDM dan kulturalnya. Semua itu akan menjadi catatan penting kajian awal dari JICA," terangnya. Ditambahkan, pertemuan bersama pihak Kantor Perwakilan JICA Indonesia tersebut belum membahas hingga hal yang bersifat sangat teknis karena masih berada pada tahap survei awal. Kemungkinan pembahasan berkaitan dengan itu akan dilanjutkan lagi pada Maret mendatang. Setelah menerima masukan dan berdialog dengan bapak Gubernur," ujarnya. Sementara itu Senior Representative Kantor Perwakilan JICA Indonesia, Okamura Kenji mengakui, kunjungan tersebut untuk menyampaikan satu laporan interim, mengenai rencana mengembangkan wilayah aerotropolis sekitar YIA. "Kami sudah melakukan penandatanganan MoU pada Oktober yang lalu. Sekarang Januari, survei ini akan berakhir pada akhir bulan Maret. Maka itu kunjungan kami ini menyampaikan satu interim report sebagai summary. Kami sampaikan dan pada akhir bulan Maret kami ingin me-

nyampaikan satu draf final mengenai perencanaan,"

ungkap Okamura Kenji. (Ria)-f

KPKNl YOGYAKARTA **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)**

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DAN LELANG EKSEKUSI FIDUCIA

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Jaminan Fiducia Nomor 42 tahun 1999, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan Leilang Eksekusi Hak Tanggungan dan Leilang Eksekusi Fiducia dengan penawaran leilang melalui internet (Closed Bidding) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Leilang (KPKNl) Yogyakarta, terhadap jaminan debitur **PT. Perwira Abadi Jaya** sebagai berikut:

Dijual dalam satu paket 2 (dua) bidang tanah seluas 4.439 M2 berikut bangunan hotel dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam / melekat diatasnya, serta peralatan dan perlengkapan hotel (mechanical & equipment, room equipment, kitchen equipment, bar equipment) terletak di Desa/Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dokumen kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00075/Ngampilan tanggal 26 September 1995 luas 4.212 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00285/Ngampilan tanggal 29 Mei 2013 luas 227 M2 keduanya tercatat atas nama PT. PERWIRA ABADI JAYA berkedudukan di Yogyakarta dan sesuai Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W14.00025293.AH.05.01 TAHUN 2017 TANGGAL : 06-04-2017 JAM : 13.51.03.

Nilai Limit : Rp. 165.000.000.000,- ; Uang Jaminan : Rp. 41.250.000.000,-

Syarat-syarat leilang :

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta leilang melalui internet (Closed Bidding) dengan menggunakan Aplikasi Lelang melalui Internet yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara dan panduan mengikuti leilang dapat dilihat pada domain tersebut.
- Calon peserta leilang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat <https://www.lelang.go.id> dengan merekam serta mengunggah Softcopy KTP, NPWP (ekstensi file_*.jpg, *.png) dan rekening atas nama sendiri.
- Peserta leilang wajib menyetor uang jaminan leilang / harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNl Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan leilang.
- Uang jaminan leilang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta leilang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta leilang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Waktu Pelaksanaan Leilang : Hari / tanggal : Rabu / 15 Februari 2023 Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 waktu server E-Auction (sesuai Waktu Indonesia Barat) : <https://www.lelang.go.id> : KPKNl Yogyakarta GKN Yogyakarta Gedung B Jl. Kusumanegara No.11 Yogyakarta
- Penetapan Pemegang : setelah batas akhir penawaran
- Pelunasan pembayaran ditambah biaya leilang 3% pada lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan leilang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal leilang dan pembeli leilang dinyatakan wanprestasi serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
- Objek leilang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya-biaya tertunggak atas objek leilang. Peserta leilang dianggap mengetahui / memahami kondisi objek leilang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan / penundaan pelaksanaan leilang terhadap objek leilang di atas, pihak-pihak yang berkepentingan & peminat leilang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNl Yogyakarta, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat, Kanwil DJKN, Kantor Pusat DJKN.
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNl Yogyakarta beralamat GKN Yogyakarta Gedung B Jl. Kusumanegara No.11 Kota Yogyakarta Telp (0274) 544091; PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. d.h.l. Credit Restructuring and Recovery Division Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta Telp (021) 5751218, 081383897375.
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan / atau Pejabat Leilang dapat melakukan pembatalan / penundaan leilang terhadap objek leilang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan dan peminat leilang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pejabat Leilang, dan/atau KPKNl Yogyakarta.

WASPADA TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN LELANG !
Yogyakarta, 1 Februari 2023
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
CREDIT RESTRUCTURING & RECOVERY DIVISION